



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan merupakan suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk dapat mencapai suatu tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012) dalam Ahmad Rahmansah, *et al* (2023) dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Financial Management* yang telah di alih bahasa menjadi prinsip-prinsip manajemen keuangan mengemukakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.

Sutrisno (2000) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisiensi. Berikut adalah bagaimana suatu entitas publik mengelola pendapatan, pengeluaran, dan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efektif dan efisien:

1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Perencanaan dan penganggaran merupakan fondasi penting dalam pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) perlu



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

disusun secara partisipatif yang melibatkan masyarakat dan perwakilan desa dengan mengacu pada potensi lokal dan prioritas pembangunan. Proses ini mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan, hingga evaluasi siklus anggaran, yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Studi kasus di Desa Ngawen menunjukkan bahwa pembangunan yang efektif tidak terlepas dari kebijakan partisipatif dan manajemen APBDes yang berbasis *good governance* Handayani, *et al* (2021).

2. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa

Efektivitas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh pengelolaan pendapatan dan belanjanya. Desa harus mengoptimalkan sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Desa (PADes) dan dana transfer, serta melakukan pengelolaan belanja yang berorientasi pada efisiensi dan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian di Desa Bontomanai mengungkapkan bahwa meskipun efektivitas anggaran bisa tinggi ($> 100\%$), efisiensi pengeluaran ternyata masih rendah ($\sim 99\%$), menunjukkan kebutuhan perencanaan belanja yang lebih cermat Nurrahman, (2020) Dengan demikian, optimalisasi pendapatan dan kontrol ketat terhadap belanja sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan fiskal desa.

3. Evaluasi Kinerja Keuangan

Analisis rasio keuangan menjadi alat penting untuk mengevaluasi apakah manajemen keuangan desa telah efektif, efisien, dan berkelanjutan. Rasio efektivitas mengukur sejauh mana realisasi pendapatan mencapai target, rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana belanja dikelola secara hemat, dan rasio



pertumbuhan mencerminkan tren pendapatan dari tahun ke tahun. Sebuah studi di Desa Telaga Sari menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan anggaran berada pada 96–99%, namun efisiensi baru sekitar 99%, mengindikasikan ruang perbaikan dalam pengendalian pengeluaran Setiawan, (2022). Evaluasi ini menjadi landasan penyesuaian strategi penganggaran di masa mendatang dan menunjukkan tingkat kematangan fiskal desa.

2.1.2 Manajemen Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 (1) dalam Ahmad Rahmansah, *et al* (2023) manajemen keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Permen Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berikut adalah bagaimana desa mengelola keuangannya secara akuntabel dan berkelanjutan:

1. Penyusunan dan Pengelolaan APBDes

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi perencanaan yang terstruktur, identifikasi sumber pendapatan, dan penetapan alokasi anggaran. Penyusunan ini mencakup berbagai sumber



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pendapatan seperti Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Pendapatan bagi Hasil Pajak. Perencanaan anggaran harus dilakukan secara partisipatif melibatkan tokoh masyarakat, BPD, dan lembaga desa untuk memastikan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Hasil penelitian di Desa Kadubeureum menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes berperan penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel Saidi, *et al* (2025).

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Desa

Pelaksanaan dan penatausahaan menjadi krusial agar penggunaan dana sesuai aturan. Kaur Keuangan bertanggung jawab menjalankan sistem administrasi keuangan desa, termasuk pencatatan transaksi dan penggunaan aplikasi Siskeudes jika tersedia. Evaluasi di Desa Jenetallasa menunjukkan bahwa penggunaan Siskeudes meningkatkan kualitas akuntabilitas dan efektivitas pencatatan keuangan desa, meskipun tantangan seperti keterbatasan SDM dan kendala teknis masih ada Juardi, *et al* (2018).

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa

Tahap pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik. Kepala Desa wajib menyusun ‘Laporan Realisasi APBDes’ yang diaudit oleh BPD dan inspektorat, kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Menurut studi di Desa Wiau Lapi Barat, pelaporan periodik APBDes melalui Musyawarah Desa sangat meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas pengawasan horizontal dan sosial Kristini, *et al* (2020).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

2.1.3 Kinerja Pengelolaan Keuangan

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Penilaian terhadap kinerja ini umumnya dilakukan melalui pendekatan analisis rasio keuangan, yang didasarkan pada data-data kuantitatif dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah, khususnya dalam bentuk laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Irnawati, *et al* (2023). Rasio keuangan ini digunakan untuk menginterpretasikan kondisi keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, serta mengidentifikasi potensi, kelemahan, dan tren keuangan yang berkembang dari waktu ke waktu.

Pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki urgensi yang tinggi karena menjadi dasar dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah daerah. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabilitas tidak hanya bermakna sebatas pada penyampaian informasi bahwa anggaran telah digunakan, melainkan juga mencakup bagaimana anggaran tersebut dikelola untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan bukan hanya untuk memenuhi aspek administratif, melainkan juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar memberi dampak nyata terhadap pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.



Menurut Halim (2012) Analisis rasio keuangan yang dilakukan atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap berbagai aspek penting kinerja keuangan, di antaranya:

1. Tingkat kemandirian keuangan daerah, yakni sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan dan pembangunan tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat;
2. Tingkat efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan target pendapatan, termasuk kemampuan mencapai target anggaran serta penggunaan sumber daya secara optimal;
3. Aktivitas belanja daerah, yaitu ukuran intensitas dan proporsi penggunaan dana untuk berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan;
4. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan, seperti Pendapatan Asli Desa, dana perimbangan, dan lain-lain, dalam membentuk struktur pendapatan daerah secara keseluruhan;
5. Tingkat pertumbuhan pendapatan dan belanja, untuk melihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam pengelolaan anggaran selama periode waktu tertentu.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mencerminkan seberapa baik kepala daerah dalam menjalankan fungsi anggaran, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan keuangan yang lebih baik, menetapkan prioritas pembangunan, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah ke depan.



2.1.4 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Poltak Sinaga (2014) dalam Sirait Hotnida, (2017) Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecendrungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Menurut James van Horne dan Wachowicz (2005) dalam Sirait Hotnida, (2017) Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analisis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dari hubungan-hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007) dalam Sirait Hotnida, (2017) Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total asset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis keuangan. Sementara menurut Mohammad Muslich (2003) dalam Sirait Hotnida, (2017) Analisis rasio keuangan merupakan alat analisis yang berguna apabila dibandingkan dengan rasio standar. Terdapat dua macam rasio standar yang lazim digunakan yang pertama adalah rasio yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun yang lampau. Yang kedua adalah rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan perusahaan yang dianalisis. Rasio standar kedua ini lazim disebut rata-rata rasio industri.



2.1.5 Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif Mahmudi (2010) dalam Sartika, *et al* (2019). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian Halim (2007) dalam Sartika, *et al* (2019). Adapun rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD } (t - 1)}{\text{PAD tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2018) dalam Ervina Makaminang, *et al* (2022) menyatakan bahwa efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Rasio Efektivitas menurut Halim (2007) dalam Hikmah, *et al* (2023) “Rasio efektivitas membandingkan tujuan



yang ditetapkan berdasarkan potensi sebenarnya dengan kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan pendapatan asli desa yang diharapkan. Analisis rasio yaitu alat untuk menghitung rasio keuangan, dibuat berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari anggaran pendapatan desa”. Berikut adalah rumus dari Rasio Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2.1.6 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan Khilmiyah, (2016). Karena dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah desa yang harus membuat laporan keuangan sebagai bukti telah melakukan berbagai transaksi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan, Sedangkan dilihat dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepala desa atau masyarakat umum secara luas. Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik. Beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain: Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa



sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan. Mengetahui tingkat efektivitas, efesiensi, dan kebermanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya mengenai Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama/Tahun/Identitas Jurnal	Variabel Penelitian Dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Periode (2019-2020) Pada Kantor Desa Kagungan Rahayu Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Dhea Ayu Anggela & Ardiansyah Japlani, 2022) Jurnal Manajemen Diversifikasi Vol. 2. No. 2	Rasio Efektivitas X1 Rasio Pertumbuhan X2 Kinerja Keuangan Y Alat Analisis data nya adalah Analisis Rasio Keuangan: Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan menggunakan analisis kuantitatif deskriptif	Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa umumnya tergolong efektif. Rasio Pertumbuhan menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan tren naik dan turun.
2.	Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Desa Leppangeng Kabupaten Bone (Andi Nurwana <i>et al.</i> , 2023) <i>PRECISE: Journal of Economic</i> Vol. 2 No. 1, April 2023, 9-17	Rasio Efektivitas X1 Rasio Efisiensi X2 Kinerja Keuangan Y Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	Kinerja Keuangan Desa Leppangeng tergolong baik, dengan efektivitas rata-rata 100% (kategori sangat efektif), namun efisiensi masih kurang optimal dengan rata-rata 99,75%.
3.	Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan (Rasta Seviafani Hidayat <i>et al.</i> , 2023) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Vol. 6 (2)	Rasio Efektivitas X1 Rasio Efisiensi X2 Rasio Pertumbuhan X3 Kinerja Keuangan Y Alat analisis data yang digunakan adalah Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio	Pengelolaan ADD di Desa Klungkung dinilai efektif dan efisien, namun Pertumbuhan Kinerja Keuangan masih rendah, sehingga perlu strategi peningkatan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Judul>Nama/Tahun/Identitas Jurnal	Variabel Penelitian Dan Alat Analisis Data	Hasil Penelitian
		Pertumbuhan (Deskriptif Kuantitatif)	
4.	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Niar Fedwiriansyah <i>et al.</i> , 2024) Vol. 05 No. 01 Tahun 2024 ISSN Media Elektronik: 2722-6557	Rasio Efektivitas X1 Rasio Efisiensi X2 Kinerja Keuangan Y Alat analisis yang digunakan adalah Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (Deskriptif Kuantitatif)	Rata-rata Efektivitas Keuangan mencapai 99,80% (efektif), tetapi Efisiensi sebesar 99,88% menunjukkan masih ada inefisiensi, sehingga perbaikan strategi dibutuhkan.
5.	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar (Irnawati <i>et al.</i> , 2023) Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia JMMNI Volume 4 Nomor 3 Juni 2023 Hal. 403 – 416	Rasio Kemandirian X1, Rasio Efektivitas X2 Rasio Pertumbuhan X3 Kinerja Keuangan Y Alat analisis data nya adalah Rasio Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan (Deskriptif Kuantitatif)	Rasio Kemandirian tergolong sedang (59,25%), Efektivitas kurang efektif (82,53%) dan Pertumbuhan PAD negatif (-2,59%), yang mengindikasikan stagnasi dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sumber: Data Olahan, 2025

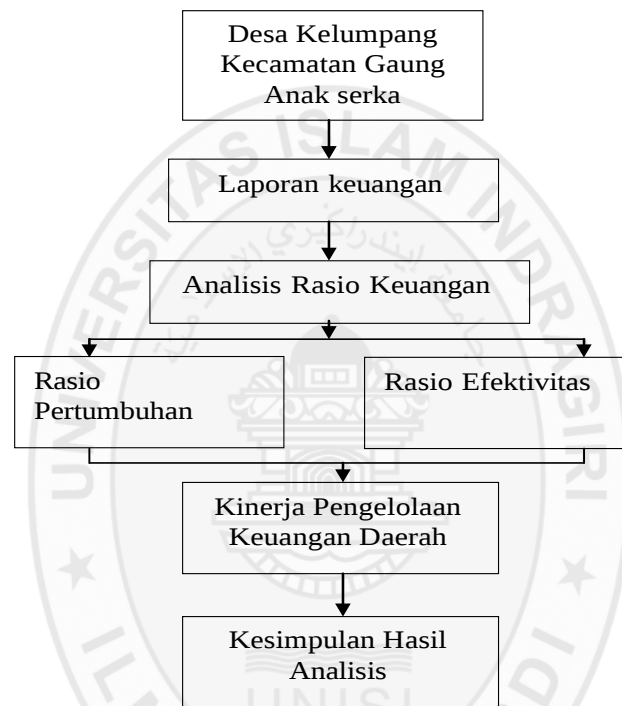
2.3 Kerangka Pemikiran

Kinerja keuangan daerah dievaluasi melalui laporan keuangan yang disusun secara berkala setiap periode. Kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan anggaran secara optimal. Di sisi lain, rasio pertumbuhan menjadi indikator penting dalam menilai perkembangan keuangan desa dari waktu ke waktu, baik dalam hal pendapatan, belanja, maupun surplus/defisit anggaran. Jika suatu desa menunjukkan pertumbuhan yang positif, maka hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kinerja secara kuantitatif. Namun, untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

benar-benar mencerminkan keberhasilan, perlu juga dilihat efektivitas realisasi anggaran terhadap target yang telah direncanakan. Penggunaan analisis rasio pertumbuhan dan efektivitas dalam mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Periode Tahun 2021–2024 dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, yang umumnya menanyakan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini disusun sebelum data dikumpulkan, dan dapat dianggap sebagai jawaban teoritis berdasarkan kajian literatur atau kerangka berpikir, bukan jawaban yang diperoleh dari hasil pengamatan atau analisis empiris. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Sugiyono, (2019) menyebutkan bahwa



hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga Kinerja keuangan APBDes Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021–2024 dilihat dari Rasio Pertumbuhan sudah tumbuh.

H₂: Diduga Kinerja keuangan APBDes Desa Kelumpang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021–2024 dilihat dari Rasio Efektivitas sudah efektif.

2.5 Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) merupakan variabel yang memengaruhi variabel dependen (terikat). Menurut Sugiyono, (2017) variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah Rasio Pertumbuhan dan Rasio Efektivitas, yang kemudian masing-masing dilambangkan dengan (X).

2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono, (2015) variabel dependen disebut juga sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuensi. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah



Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa, yang dilambangkan dengan (Y).

Tabel 2.2
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel Penelitian	Pengertian	Rumus	Skala
1.	Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat menghasilkan selama satu periode waktu.	1. Rasio Pertumbuhan 2. Rasio Efektivitas	Ratio
2.	Rasio Pertumbuhan (X1)	rasio yang menggambarkan apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode, kinerjanya mengalami pertumbuhan apa tidak	$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD \text{ tahun } t - PAD (t - 1)}{PAD \text{ tahun } (t - 1)} \times 100\%$	Ratio
3.	Rasio Efektivitas (X2)	Alat rasio keuangan yang digunakan adalah analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah	$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$	Ratio

Sumber: Data diolah penulis, 2025